PIDATO PENGUKUHAN

Jabatan Akademik Guru Besar

Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia/Kepemimpinan

REORIENTASI KEPEMIMPINAN DI TENGAH KRISIS KETELADANAN & POLITIK PRAGMATIS:

dari Kepemimpinan Transformasional ke Transaksional



Prof. Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si.

Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Luar Biasa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Gowa, 2 April 2026

REORIENTASI KEPEMIMPINAN DI TENGAH KRISIS KETELADANAN & POLITIK PRAGMATIS:

dari Kepemimpinan Transformasional ke Transaksional

Prof. Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si.

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya
Manusia/Kepemimpinan
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Selasa, 31 Maret 2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR, TAHUN 2026

REORIENTASI KEPEMIMPINAN DI TENGAH KRISIS KETELADANAN DAN POLITIK PRAGMATIS:
Dari Kepemimpinan Transformasional ke Transaksional

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang saya hormati:

1. Ketua Senat dan Ketua Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar;
2. Rektor UIN Alauddin Makassar;
3. Para Wakil Rektor dan Kepala Biro UIN Alauddin Makassar;
4. Sekretaris Senat dan Sekretaris Dewan Guru Besar UIN Alauddin Mks;
5. Anggota Senat dan Para Guru Besar UIN Alauddin Makassar;
6. Para Dekan dan Wakil Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassa;
7. Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Alauddin Makassar dan Jajarannya
8. Ibu dari Anak-anakku dan putra-putriku serta seluruh keluarga yang ber-bahagia;
9. Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar dan para undangan yang saya muliakan.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya. Atas izin dan kehendak-Nya pula, pada hari yang berbahagia dan bermakna ini, kita dapat berkumpul dalam sebuah forum akademik yang mulia, penuh kehormatan, dan sarat nilai peradaban.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Junjungan kita Nabiyullah Muhammad saw., beserta

keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang patut diteladani dalam setiap aktivitas dalam menyebar kebaikan.

Secara khusus, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam sekaligus penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh jajaran, yang memberikan amanah dan kesempatan kepada saya untuk menunaikan salah satu tradisi akademik tertinggi dalam kehidupan keilmuan, yakni menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia/Kepemimpinan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sejak awal berdiri memosisikan diri sebagai Kampus Peradaban, yang mengintegrasikan ilmu, iman, dan tanggung jawab sosial.

Sidang Senat Terbuka Luar Biasa yang terhormat, perkenankan saya menyampaikan sekelumit sumbangsih pemikiran akademik yang saya rangkum dalam orasi ilmiah berjudul: "***Reorientasi Kepemimpinan di Tengah Krisis Keteladanan dan Politik Pragmatis: Dari Kepemimpinan Transformasional ke Transaksional***". Pilihan tema ini bukan semata-mata sebagai wacana teoretik, melainkan sebagai refleksi kritis atas realitas kepemimpinan kontemporer yang tengah kita hadapi, baik dalam ranah politik, birokrasi, organisasi publik, maupun institusi sosial-keagamaan.

Orasi ini diilhami kegelisahan intelektual atas semakin menguatnya kecenderungan kepemimpinan yang terjebak pada logika transaksional, pragmatis, dan jangka pendek, yang perlahan mengikis ruh keteladanan, visi moral, serta tanggung jawab historis seorang pemimpin. Karena itu, pembahasan disusun dalam Tiga bagian: ***Pertama***, menelaah dinamika per-geseran paradigma kepemimpinan transformasional menuju transaksional

dalam konteks sosial-politik mutakhir; ***Kedua***, mengkaji krisis keteladanan dan pragmatisme politik sebagai tantangan serius bagi keberlanjutan kepemimpinan bermakna; dan ***Ketiga***, menawarkan gagasan reorientasi ke-pemimpinan yang berlandaskan nilai, visi perubahan sosial, serta integrasi dimensi etika dan spiritualitas sebagai fondasi kepemimpinan masa depan.

Melalui orasi ini, saya berharap dapat turut berkontribusi sekecil apa pun dalam memperkaya khazanah keilmuan kepemimpinan, sekaligus mengajak kita semua untuk kembali menempatkan kepemimpinan bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai amanah peradaban yang kelak akan dipertanggung-jawabkan, baik di hadapan manusia maupun dihadapan Allah swt.

Pendahuluan

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Setiap perbincangan tentang kepemimpinan, sejatinya, selalu berujung pada satu pertanyaan mendasar: ***atas dasar apa kekuasaan dijalankan, dan kepada siapa ia harus dipertanggungjawabkan****?*. Dalam tradisi keilmuan dan peradaban Islam, kepemimpinan tidak pernah dipahami semata sebagai posisi struktural atau hasil kontestasi politik, melainkan sebagai amanah luhur yang sarat dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab spiritual. Karena itu, mari kita merenungkan tuntunan yang meletakkan amanah dan keadilan sebagai fondasi utama kepemimpin-an. Allah swt., berfirman **(QS al-Nisā'/4:58)**.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan,

Di dalam kitab suci, amanah selalu menjadi ukuran sejati dari kepemimpinan. Ia bukan sekadar beban administratif, melainkan ujian moral dan spiritual perwujudan tanggung jawab di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah. Kepemimpinan adalah cermin: bukan hanya memperlihatkan siapa yang memimpin, tetapi juga siapa yang dipimpin, dan nilai apa yang dihidupkan oleh keduanya.[1]

Kisah 'Umar bin al-Khattāb dalam sejarah Islam, beliau adalah seorang khalifah agung menangis di malam hari bukan karena kekurangan kekuasaan, melainkan karena ketakutan akan kezaliman yang mungkin luput dari perhatiannya. Beliau berkata, "***Seandainya seekor keledai tersandung di Irak, niscaya aku takut Allah akan menanyakan, mengapa jalan itu tidak aku ratakan***".[2] Ungkapan ini menggambarkan hakikat terdalam dari kepemimpinan rasa gentar untuk berbuat zalim, dan kepekaan terhadap penderitaan sekecil apa pun di bawah tanggungjawab-nya.[3]

Pandangan nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan, kepemimpinan bukan kehormatan yang

[1]Harjo Susmoro, *Kepemimpinan Robbani* (Pandiva Buku, 2022).

[2]Ali Muhammad al-Shalaby, *Biografi Umar Bin Khattab* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017).

[3]Muh Hasyim Rosyidi, "Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 19–31.

diminta, tetapi pengabdian yang dipikul. Ia bukan milik yang kuat, tetapi amanah bagi yang siap menanggung beban kebenaran. Karena itu, dalam bahasa moral, pemimpin sejati bukan yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang takut berbuat zalim kepada rakyatnya. Namun, jika kita menatap lanskap kepemimpinan bangsa hari ini, refleksi moral itu seakan bergema di ruang hampa. Kita menyaksikan bagaimana makna kepemimpinan mengalami pergeseran yang mencemaskan dari amanah menjadi alat transaksi, dari keteladanan menjadi pencitraan, dari visi perubahan menjadi strategi mempertahankan kekuasaan.

Hari ini, kita hidup di tengah era yang ditandai oleh krisis keteladanan. Kepemimpinan yang dahulu menjadi sumber inspirasi kini seringkali menjadi sumber kekecewaan. Di ruang publik, kita menyaksikan maraknya budaya pragmatisme politik; nilai dikorbankan demi kepentingan; integritas tergadaikan oleh kompromi; dan kebijakan lahir bukan dari nurani, tetapi dari negosiasi kepentingan.[4] Fenomena ini bukan hanya persoalan politik, melainkan juga krisis paradigmatik dalam kepemimpinan: terjadinya pergeseran dari model kepemimpinan transformasional yang membangun visi, nilai dan perubahan menuju kepemimpinan transaksional yang menekankan imbal jasa, kepentingan, dan kepatuhan sesaat. Dalam dunia politik, ekonomi, hingga lembaga sosial dan pendidikan, kepemimpinan cenderung diukur dengan indikator loyalitas, kedekatan, dan hasil instan. Kita jarang lagi berbicara tentang ***visionary leadership*** atau ***moral courage***,[5] karena yang lebih dihargai seringkali adalah

[4]Satryo Pringgo Sejati and Ahmad Burhan Hakim, "Politik Transaksional Dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 69–75.

[5] Rido Hermawan et al., "The Influence of Visionary Leadership on the Success of Organizational Transformation," *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora* 2, no. 2 (2024): 100–108.

political survival kemampuan bertahan dalam sistem yang lebih menghargai kepatuhan dibanding integritas.

Para pendiri bangsa ini membangun di atas fondasi idealisme serta pengorbanan, dan mereka bukan para pedagang kekuasaan, melainkan pemimpin transformatif yang berani berpikir melampaui dirinya. Mereka tidak hanya mengelola rakyat, tetapi menyalakan harapan; tidak hanya memerintah, tetapi menuntun jiwa bangsa untuk bermartabat. Kini, di tengah derasnya arus politik pragmatis, ruh kepemimpinan transfor-masional itu perlahan memudar. Kita seakan bergerak mundur dari kepemimpinan yang membangkitkan nilai menuju kepemimpinan yang memperdagangkan nilai; dari semangat pelayanan menuju semangat perhitungan.

Akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa tinggi seseorang mendaki tangga kekuasaan, tetapi seberapa dalam ia menanamkan nilai dan harapan di hati orang-orang yang ia pimpin. Dalam pandangan iman, kepemimpinan bukan sekadar sukses dihadapan manusia, tetapi per-tanggungjawaban yang berat dihadapan Allah ketika setiap amanah akan ditanya, dan setiap kebisuan dihadapan ketidakadilan akan dimintai penjelasan.

Permasalahan Kepemimpinan Terkini

Khazanah pemikiran klasik maupun modern, kepemimpinan selalu menjadi tema sentral dalam pembahasan tentang peradaban manusia. Ibn Khaldun menegaskan bahwa *al-mulk bi al-'adl yaqūm* kekuasaan hanya akan tegak di atas keadilan. Namun, dalam konteks kekinian, makna luhur kepemimpinan sebagai amanah (*trusteeship*) kian memudar di tengah riuh redah politik transaksional dan kompetisi kekuasaan yang sarat

kepenting-an.[6] Krisis keteladanan kini menjadi wajah muram dari dinamika sosial-politik bangsa. Ada tiga permasalah kepemimpinan terkini, yaitu:

1. **Krisis Keteladanan dan Erosi Nilai Publik (Fenomena Empiris)**

   Indonesia hari ini menyaksikan paradoks kepemimpinan: di satu sisi, demokrasi kian matang secara prosedural; tetapi di sisi lain, kualitas moral dan etika publik justru mengalami kemunduran substansial. Fenomena ini tampak dari maraknya praktik *patronase, money politics*, dan politik identitas yang menjerat proses rekrutmen politik maupun birokrasi[7].

   Data *Transparency International* menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun-tahun terakhir stagnan pada level yang mengkhawatirkan, menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan belum pulih.[8] Di berbagai survei sosial, publik menilai para pemimpin baik politikus, pejabat birokrasi, maupun tokoh masyarakat cenderung lebih reaktif terhadap tekanan kekuasaan dibandingkan berani menegakkan nilai moral dan kepentingan rakyat.

   Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan manifestasi dari sistem politik yang terlalu menekankan *electability* di atas *integrity*. Pemimpin yang berpotensi membawa perubahan transformatif seringkali terpinggirkan oleh logika pragmatis elektoral yang berorientasi pada ke-pentingan jangka pendek. Akibatnya, kepemimpinan di berbagai sektor politik,

[6]Risma Novitasari and Ardan Alif, "Mewujudkan Keadilan Politik Di Era Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketimpangan Dan Akses Kekuasaan," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 2 (2025): 350–55.

[7]Edward Aspinall and Mada Sukmajati, *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots* (NUS Press, 2016).

[8] https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn.

ekonomi, pendidikan, dan bahkan keagamaan cenderung ber-sifat reaktif, simbolik, dan seremonial, tanpa daya ubah yang sejati terhadap struktur ketidakadilan sosial.

2. Krisis Moral dan Nilai: Dari Pelayan Publik ke Pelayan Diri

Kepemimpinan sejatinya berakar pada konsep pelayanan (*servant leadership*).[9] Namun, dalam praktik kontemporer, makna pelayanan publik sering kali bergeser menjadi instrumen kepentingan pribadi atau kelompok. Kepemimpinan publik tidak lagi diukur dari kemampuan membawa kemaslahatan umum, tetapi dari kemampuan membangun jaringan, mengatur alokasi sumber daya, dan mengelola "*transaksi*" kekuasaan. Akibatnya, muncul oleh para sosiolog disebut sebagai ***moral dislocation*** keterputusan antara kekuasaan dan nilai.[10] Seorang pemimpin dapat tampil karismatik di ruang publik, namun kehilangan integritas di ruang batin. Keteladanan berubah menjadi citra, dan tanggung jawab berubah menjadi negosiasi kepentingan.

Fenomena ini juga menggerus makna keadaban politik (*political civility*).[11] Diskursus publik yang seharusnya mencerminkan etika deliberatif justru diwarnai ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan pembelahan sosial. Di titik ini, kepemimpinan transaksional tidak hanya menjadi model manajerial, tetapi juga mentalitas baru yang mengakar dalam struktur sosial: setiap relasi kekuasaan dibingkai dalam

[9] Nathan Eva et al., "Servant Leadership: A Systematic Review and Call for Future Research," *The Leadership Quarterly* 30, no. 1 (2019): 111–32.

[10] Cressida J Heyes, "Dislocation and Self-Certainty: Remarks on Disorientation and Moral Life," *Feminist Philosophy Quarterly* 4, no. 2 (2018).

[11] J Cherie Strachan and Michael R Wolf, "Political Civility: Introduction to Political Civility," *PS: Political Science & Politics* 45, no. 3 (2012): 401–4.

kalkulasi untung-rugi, bukan dalam nilai dan visi perubahan.

3. Kebutuhan Riset dan Refleksi Akademik: Mencari Arah Baru

Kondisi di atas menuntut sebuah refleksi akademik yang serius: mengapa kepemimpinan yang dahulu bersifat transformatif membawa visi moral dan sosial yang kuat kini terjebak dalam logika transaksi?. Apakah transformasi nilai dalam kepemimpinan masih relevan di era pragmatisme politik modern?.

Perspektif kepemimpinan modern, kita mengenal dua paradigma besar: kepemimpinan transformasional,[12] yang menekankan inspirasi, visi, dan perubahan nilai; serta kepemimpinan transaksional.[13] yang berfokus pada sistem imbalan, kepatuhan, dan stabilitas. Namun, dalam praktik sosial-politik Indonesia, kedua paradigma ini tidak lagi berada pada spektrum ideal, melainkan saling tumpang tindih dalam bentuk pseudotransformational leadership, pemimpin yang tampak transformatif dalam retorika, tetapi transaksional dalam tindakan.

Kebutuhan akan kajian dan refleksi akademik menjadi mendesak. Dunia akademik harus berperan tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pengarah moral bagi sistem kepemimpinan bangsa. Kita memerlukan pendekatan ilmiah untuk merumuskan kembali model kepemimpinan yang berakar pada nilai etika dan spiritualitas, tanpa mengabaikan realitas politik yang kompleks.

---

[12]Hani Handoko and Fandy Tjiptono, "Kepemimpinan Transformasional Dan Pemberdayaan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 11, no. 1 (1996).

[13]Dwi Ari Wibawa, "Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transfor-masional," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2012.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Tinjauan Konseptual: Kepemimpinan Transformasional vs Transaksional

Pembahasan tentang kepemimpinan selalu mengandung dua dimensi: dimensi konseptual yang bersifat teoritis, dan dimensi praksis yang men-cerminkan realitas sosial. Dua paradigma yang paling berpengaruh dalam kajian kepemimpinan modern, dalam menggambarkan dinamika perubahan sosial dan perilaku organisasi, yaitu: *transformational leadership*,[14] dan *transactional leadership*.[15] Kedua konsep ini tidak sekadar menawarkan dua gaya manajerial yang berbeda, melainkan dua filosofi moral dan visi ke-manusiaan yang berlawanan arah: antara kepemimpinan yang menyalakan semangat perubahan dan kepemimpinan yang menjaga stabilitas melalui imbalan dan kepatuhan.

1. Kepemimpinan Transformasional: Menyalakan Ruh Perubahan

Konsep kepemimpinan transformasional pertama kali dikembangkan James MacGregor Burns,[16] dalam karya klasiknya *Leadership*. Burns menegaskan bahwa pemimpin transformasional bukan sekadar *mempertukarkan kepentingan* dengan pengikut, melainkan mentransformasi nilai, kesadaran, dan tujuan bersama menuju tingkat moralitas yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional, dalam pandangan Burns, adalah agen perubahan moral dan sosial yang mampu mengangkat motivasi pengikut dari

[14]Kenneth Leithwood and Doris Jantzi, "Transformational Leadership," *The Essentials of School Leadership* 31 (2005): 43; Bernard M Bass and Ronald E Riggio, *Transformational Leadership* (Psychology press, 2006); James MacGregor Burns, *Leadership* (Open Road Media, 2012).

[15] Marco Tavanti, "Transactional Leadership," in *Leadership: The Key Concepts*, 2008.

[16] Burns, *Leadership*.

kepentingan pribadi (*self-interest*) menuju ke-pentingan kolektif (*collective good*).

Gagasan ini kemudian diperkaya oleh Bernard M. Bass,[17] yang merumuskan empat karakteristik utama atau yang dikenal dengan *Four I's of Transformational Leadership*:

a. *Idealized Influence* (Pengaruh Ideal) Pemimpin menjadi teladan moral, menunjukkan integritas dan komitmen yang menginspirasi kepercayaan.
b. *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspiratif) Pemimpin menanam-kan semangat dan optimisme dalam mencapai visi bersama.
c. *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual) Pemimpin mendorong inovasi dan pemikiran kritis dalam menghadapi tantangan.
d. *Individualized Consideration* (Perhatian Individual) Pemimpin memperhatikan pengembangan potensi, empati, dan kebutuhan setiap anggota tim.

Melalui pendekatan ini, kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai katalis moral dan intelektual. Ia tidak hanya memimpin melalui perintah dan kontrol, tetapi dengan menginspirasi makna dan arah. Pemimpin transformasional melihat kepemimpinan sebagai proses memanusiakan manusia membangkitkan kesadaran, menyalakan harap-0an, dan membentuk tatanan nilai baru.

Model ini dalam konteks bangsa, mencerminkan semangat kepemimpinan para tokoh besar yang menggerakkan sejarah melalui keteladanan moral seperti Nabi Muhammad saw., Umar bin Khaṭṭāb, Mahatma Gandhi, atau Soekarno. Kepemimpinan

[17] Bass and Riggio, *Transformational Leadership*.

mereka tidak bergantung pada kekuatan material, melainkan pada kekuatan visi dan ketulusan untuk melayani.

2. Kepemimpinan Transaksional: Efisiensi dalam Batasan Sistem

Sebaliknya, kepemimpinan transaksional berakar pada prinsip *reward* and *punishment*, yaitu pertukaran antara pemimpin dan pengikut berdasarkan kesepakatan eksplisit: ketaatan ditukar dengan imbalan, dan pelanggaran dibalas dengan sanksi.[18] Teori ini berkembang kuat dalam konteks organisasi modern yang menuntut efisiensi, keteraturan, dan stabilitas birokrasi.

Pemimpin transaksional cenderung fokus pada proses, kontrol, dan hasil jangka pendek. Ia menekankan kinerja terukur, kepatuhan ter-hadap prosedur, serta pengelolaan sistem melalui insentif dan disiplin. Dalam kerangka Weberian, tipe ini identik dengan "kepemimpinan rasional-legal", yang menegakkan otoritas melalui aturan formal, bukan melalui kharisma atau nilai-nilai moral.

Model ini memiliki keunggulan tersendiri: ia efektif menjaga keteraturan organisasi, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memastikan stabilitas dalam situasi yang menuntut kepastian. Namun, model ini memiliki kelemahan mendasar ia tidak menyalakan inspirasi, dan sering gagal menjawab kebutuhan perubahan sosial yang kompleks. Dalam konteks birokrasi publik di Indonesia, model ini tampak dominan. Pemimpin birokratis sering kali mengelola struktur dengan presisi administratif, tetapi kehilangan

[18] Andrea Lai, "Transformational-Transactional Leadership Theory," *AHS Capstone Projects Paper* 17 (2011): 1–33.

sentuhan moral dan visi perubahan. Akibatnya, organisasi berjalan secara mekanis taat prosedur, namun miskin makna.

3. Perbandingan Kritis: Nilai vs. Sistem, Ruh vs. Mekanisme

Secara konseptual, perbedaan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional bukan sekadar perbedaan metode, melainkan perbedaan paradigma. Namun dalam realitas sosial-politik Indonesia, batas antara keduanya semakin kabur. Banyak pemimpin tampil transformasional dalam retorika, tetapi transaksional dalam praktik. Retorika perubahan kerap menjadi alat legitimasi, sementara logika kepemimpinan tetap beroperasi dalam pola patronase, kompromi politik, dan kalkulasi elektoral.

Kepemimpinan semacam menurut Bass adalah *pseudo transfor-mational leadership* kepemimpinan yang tampak idealis tetapi sesungguhnya didorong oleh ambisi pribadi. Inilah yang menjelaskan mengapa krisis keteladanan muncul di tengah kelimpahan slogan perubahan.[19]

[19] Bass and Riggio, *Transformational Leadership*.

Tabel 1. Kepemimpinan Transformasional vs Transaksional

Aspek	Kepemimpinan Transformasional	Kepemimpinan Transaksional
Orientasi	Nilai, moral, visi jangka panjang	Imbalan, kontrol, efisiensi jangka pendek
Relasi Pemimpin–Pengikut	Hubungan emosional dan inspiratif	Hubungan kontraktual dan kalkulatif
Tujuan	Perubahan dan pembentukan makna baru	Pemeliharaan sistem dan stabilitas
Motivasi	Kesadaran moral dan idealisme	Kepentingan pribadi dan materi
Dampak Sosial	Transformasi sosial dan budaya	Konservasi status quo

4. Integrasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam: Menuju Kepemimpinan Profetik

Kepemimpinan dalam perspektif Islam, tidak semata persoalan manajemen atau teknik pemerintahan, melainkan bagian dari ibadah dan amanah ilahiah. Allah berfirman dalam **(Q.S. al-Nisā'/4:116)**

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚوَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukanNya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar".

Ayat ini menegaskan dua pilar kepemimpinan Islam: *amānah* (*trustwor-thiness*) dan '*adl* (*justice*). Dalam kerangka etika profetik, seorang pemimpin sejati harus memegang empat sifat utama Nabi ﷺ:[20] a) *Ṣiddīq* (jujur dan berintegritas); b) *Amānah* (dapat dipercaya); c) *Tablīg* (komunikatif dan transparan); dan d) *Faṭānah* (cerdas dan visioner).

Keempat prinsip ini bukan sekadar ideal normatif, melainkan pedoman etik yang relevan dengan teori kepemimpinan modern. *Ṣiddīq* paralel dengan *integrity*, amanah dengan *responsibility*, *tablīg* dengan *transparency*, dan *faṭānah* dengan *strategic intelligence*. Integrasi nilai-nilai ini melahirkan konsep kepemimpinan profetik, yakni kepemimpinan yang memadukan visi transformasional dengan moral transendental.

Kepemimpinan profetik hadir bukan untuk menegasikan realitas transaksional, tetapi menyelamatkan moralitas di tengah pragmatisme sistemik. Ia berupaya menjaga ruh transformasi nilai, sambil menavigasi kompleksitas kekuasaan modern. Dalam model ini, kepemimpinan menjadi jalan dakwah bukan sekadar instrumen politik untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berkemajuan.

Karena itu, perbandingan antara kepemimpinan transformasional dan transaksional bukan sekadar akademik, tetapi reflektif terhadap realitas bangsa. Kita tengah menyaksikan bagaimana transformasi idealisme sering dikompromikan oleh transaksi kekuasaan.

[20] Firda Amalia Thoyibah, "Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 582–89.

Tantangannya adalah bagaimana mengembalikan ruh kepemimpinan sebagai amanah, bukan komoditas politik; sebagai perubahan nilai, bukan sekadar perhitungan strategi. Reorientasi kepemimpinan Indonesia memerlukan keberanian moral untuk menjembatani keduanya: me-manfaatkan efisiensi sistem transaksional, tetapi dipandu nilai-nilai transendental yang menjadi fondasi transformasi sejati.

Krisis Keteladanan dan Politik Pragmatis di Indonesia: Analisis Kontekstual

Kepemimpinan selalu menjadi cermin moral suatu bangsa. Ketika pemimpin kehilangan integritas, maka arah bangsa pun kehilangan kompas nilai. Krisis keteladanan yang kini melanda Indonesia bukan sekadar per-soalan individu atau moral pribadi, tetapi gejala struktural yang lahir dari budaya politik transaksional yang mengakar dalam sistem kekuasaan. Kepemimpinan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma, dari ke-pemimpinan yang berorientasi nilai dan transformasi sosial menuju kepemimpinan yang berorientasi kepentingan dan transaksi kekuasaan.

1. **Degradasi Integritas Publik: Antara Citra dan Realitas**

   Salah satu gejala paling nyata dari krisis keteladanan adalah degradasi integritas publik. Fenomena korupsi, politik uang, dan manipulasi citra menjadi wajah baru kepemimpinan kontemporer. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa skor Indonesia hanya mencapai 37 dari 100.[21] Angka ini menempat-kan Indonesia di peringkat 99 dari 180

[21] https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn.

negara, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Angka ini bukan sekadar angka statistik, melainkan refleksi konkret dari melemahnya kepercayaan publik terhadap integritas ke-pemimpinan.

Fenomena politik uang (*money politics*) dan manipulasi citra politik menjadi praktik normal dalam demokrasi elektoral kita. Pemimpin tidak lagi dipilih karena kapasitas moral dan visi kebangsaan, tetapi karena kemampuan mengakumulasi sumber daya finansial dan mengelola persepsi publik melalui pencitraan media. Kampanye politik bergeser dari arena gagasan menuju arena transaksional dimana suara rakyat menjadi komoditas yang dapat dinegosiasikan.

Ironisnya, dalam sistem yang semakin pragmatis ini, keteladanan justru menjadi barang langka. Kejujuran dianggap naif, idealisme dianggap utopis, dan moralitas sering diposisikan sebagai retorika, bukan fondasi kepemimpinan. Padahal, dalam pandangan klasik, integritas adalah inti dari kepemimpinan. 'Umar bin Khaṭṭāb, khalifah yang dikenal adil dan tegas, pernah berkata: *"**Andai seekor keledai tergelincir di Irak, niscaya aku takut Allah akan menuntutku mengapa tidak memperbaiki jalan untuknya**"*.

Ungkapan ini mencerminkan tanggung jawab moral mendalam suatu bentuk kesadaran profetik bahwa kepemimpinan bukan privilese, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam realitas Indonesia kini, tanggung jawab seperti ini semakin kabur. Banyak pejabat publik yang lebih sibuk menjaga popularitas daripada integritas, lebih menimbang kalkulasi elektoral daripada kepentingan moral. Krisis ini menandai perubahan

orientasi kepemimpinan: dari moral calling menuju power bargaining.

2. Budaya Politik Transaksional: dari Pelayanan Publik ke Komodifikasi Kekuasaan

Fenomena politik transaksional di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam ekosistem politik yang sarat kepentingan dan lemahnya sistem kaderisasi nilai. Sistem demokrasi elektoral yang mahal, biaya politik menjadi faktor penentu utama rekrutmen kepemimpinan.[22] Akibatnya, muncul pola *political investment*, di mana jabatan publik dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan modal politik, bukan untuk mengabdi kepada rakyat.

Budaya politik seperti ini menimbulkan tiga dampak besar terhadap ekosistem kepemimpinan nasional:

a. Menurunnya Kualitas Kebijakan Publik. Orientasi kepemimpinan berakar pada transaksi politik, kebijakan publik pun cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Fokus utama bukan lagi pada pembentukan visi pembangunan yang berkelanjutan, melainkan pada pemeliharaan koalisi kekuasaan. Proyek-proyek strategis sering kali diorientasikan untuk menjaga loyalitas politik, bukan kesejah-teraan publik.
b. Distorsi dalam Rekrutmen Politik dan Birokrasi. Proses seleksi pemimpin dan pejabat publik lebih ditentukan oleh kedekatan dan patronase daripada meritokrasi dan kompetensi. Ini melahirkan apa yang disebut “birokrasi klientelistik”, di mana loyalitas pribadi lebih dihargai daripada kinerja

[22] Muhammad Alif Fahrezi, Warjio Warjio, and Indra Fauzan, “Model Rekrutmen Politik Caleg Partai Hanura Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” *PERSPEKTIF* 13, no. 4 (2024): 1015–24.

profesional. Akibatnya, sistem pemerintah-an kehilangan moral authority dan kepercayaan publik.

c. Erosi Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Politik. Survei LSI dan beberapa lembaga riset politik menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga legislatif terus menurun. Rakyat mulai memandang politik bukan sebagai arena perjuangan nilai, tetapi sebagai panggung transaksional yang elitis. Ini berpotensi menciptakan *democratic fatigue* keletihan masyarakat terhadap proses demokrasi yang kehilangan makna moral.

Perbandingan dengan masa awal reformasi memperlihatkan kontras yang tajam. Di era tersebut, kepemimpinan publik masih mengandung semangat transformasi munculnya pemimpin yang berani bicara tentang idealisme, transparansi, dan partisipasi rakyat. Namun, dua dekade kemudian, reformasi seakan kehilangan arah normatifnya, tergantikan oleh pragmatisme politik dan euforia kekuasaan.

3. Implikasi Sosial dan Ekonomi: Krisis Keteladanan sebagai Defisit *Moral Leadership*

Krisis keteladanan tidak berhenti pada ranah politik; ia merembes ke seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Kepemimpinan yang berorientasi transaksi menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Keputusan politik yang berlandaskan kepentingan jangka pendek sering kali mengabaikan keadilan distributif. Kebijakan publik tidak lagi berpihak pada kelompok rentan, tetapi pada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan akses politik.

Akibatnya, muncul defisit *moral leadership,*[23] kekosongan figur teladan yang mampu men-jadi panutan moral dan inspirasi kolektif. Dalam situasi ini, masyarakat mengalami moral disorientation: kebenaran menjadi relatif, kebaikan menjadi negosiasi, dan keteladanan menjadi nostalgia.

Dampak lanjutan adalah apatisme sosial dan penurunan partisipasi publik. Ketika rakyat merasa tidak ada pemimpin yang bisa diper-caya, maka partisipasi mereka dalam proses sosial dan politik akan menurun. Fenomena ini dapat terlihat dari meningkatnya angka golput, rendahnya minat terhadap gerakan sosial, dan melemahnya semangat gotong royong. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin diperparah oleh kebijakan yang didorong oleh kepentingan elit. Budaya "transaksi kekuasaan" menciptakan oligarki ekonomi yang memperkuat jurang antara kaya & miskin. Ketika kepemimpinan kehilangan dimensi moralnya, maka pembangunan ke-hilangan arah kemanusiaannya.

4. Dari Krisis Menuju Reorientasi

Krisis keteladanan dan politik pragmatis bukan sekadar kegagalan individu, tetapi cerminan krisis paradigma kepemimpinan. Indonesia saat ini membutuhkan bukan hanya pemimpin yang cakap secara teknokratis, tetapi pemimpin yang memiliki integritas spiritual dan komitmen moral. Dalam terminologi kepemimpinan modern, kita mem-butuhkan pemimpin transformatif yang mampu mengembalikan orientasi nilai di tengah sistem yang transaksional.

---

[23]Michael E Dantley, "Moral Leadership," *The Sage Handbook of Educational Leadership*, 2005, 34–46.

Kepemimpinan yang diharapkan bukan lagi sekadar pengelola kekuasaan, tetapi penjaga makna. Pemimpin yang memahami bahwa jabatan bukan tempat bernaung bagi ambisi, melainkan ladang untuk menanam kebajikan. Sebagaimana pesan Nabi Muhammadﷺ,

.خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

"*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian" (HR Muslim).*

Hadis ini mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati hanya akan tumbuh dari relasi moral antara pemimpin dan rakyat relasi yang dibangun atas dasar cinta, doa, dan tanggung jawab spiritual, bukan atas dasar transaksi dan kepentingan.

Krisis keteladanan dan politik pragmatis yang melanda Indonesia hari ini merupakan tanda bahwa kepemimpinan kita telah tergelincir dari jalur transformasional menuju transaksional. Ketika integritas diperdagangkan, idealisme digadaikan, dan moralitas direduksi menjadi strategi, maka bangsa kehilangan arah kepemimpinan yang visioner. Karena itu, tugas akademisi, pemikir, dan pendidik adalah menawarkan reorientasi nilai bagaimana membangun kembali ekosistem kepemimpinan yang berakar pada etika, integritas, dan tanggung jawab moral. Hanya dengan itu, kepemimpinan Indonesia dapat menemukan kembali ruh transformasinya di tengah badai pragmatisme zaman.

Reorientasi Kepemimpinan: Menemukan Kembali Ruh Transformasional

1. Rekonstruksi Paradigma Kepemimpinan

Krisis kepemimpinan yang melanda Indonesia pada dekade terakhir menandai perlunya rekonstruksi paradigma kepemimpinan dari pola yang sekadar administratif dan pragmatis menuju kepemimpinan yang kembali menyentuh ruh perubahan dan nilai-nilai moral.

Kepemimpinan masa depan tidak dapat hanya bergantung pada logika transaksional yang menekankan efisiensi, kontrol, dan keuntung-an jangka pendek. Model itu mungkin bermanfaat dalam sistem birokrasi yang menuntut keteraturan, tetapi gagal menumbuhkan trust dan inspirasi sosial yang menjadi energi utama peradaban. Sebaliknya, dibutuhkan integrasi antara efisiensi transaksional dan inspirasi transformatif di mana efektivitas sistem dan kinerja tetap dijaga, tetapi dalam bingkai nilai, etika, dan visi yang luhur. Kepemimpinan seperti ini tidak hanya mengatur, tetapi menggerakkan; tidak hanya memerintah, tetapi menginspirasi; tidak hanya mengejar hasil, tetapi membentuk makna.

Paradigma baru ini menuntut lahirnya kepemimpinan berbasis nilai (*value-based leadership*) – yakni kepemimpinan yang menjadikan moralitas, spiritualitas, dan kemanusiaan sebagai inti dari setiap kebijakan dan tindakan.[24] Artinya, kepemimpinan bukan sekadar posisi strategis, tetapi amanah ilahiyah yang menuntut pertanggungjawaban moral dihadapan manusia dan Tuhan.

---

[24]Karen Hendrikz and Amos S Engelbrecht, "The Principled Leadership Scale: An Integration of Value-Based Leadership," *SA Journal of Industrial Psychology* 45, no. 1 (2019): 1–10.

2. Tiga Pilar Reorientasi Kepemimpinan

a. Keteladanan Moral (*Moral Exemplarity*)

Keteladanan adalah jantung kepemimpinan transformatif. Dalam pandangan klasik Islam maupun teori modern, pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang ia buat, tetapi dari karakter dan integritas yang ia pancarkan. Kepemimpinan yang berorientasi moral menciptakan kepercayaan (*trust*) sosial modal yang jauh lebih penting daripada modal politik. Seorang pemimpin yang jujur, adil, dan konsisten dalam prinsip akan membangkitkan collective moral awakening dalam masyarakatnya. Rasulullahsaw., menjadi contoh tertinggi dalam hal ini: beliau memimpin bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kekuatan teladan (*uswah ḥasanah*). Ketika beliau berkata, masyarakat percaya; ketika beliau memerintah, masyarakat rela berkorban. Keteladanan seperti inilah yang kini semakin langka di tengah krisis integritas publik. Karena itu, reorientasi kepemim-pinan harus dimulai dari revolusi moral pemimpin itu sendiri menanamkan kembali rasa takut kepada Allah, tanggung jawab terhadap rakyat, dan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menumpuk keuntungan.

b. Kepemimpinan Partisipatif dan Pemberdayaan.

Pilar kedua menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif dan memberdayakan (*empowering leadership*). Dalam kerangka ini, pemimpin tidak lagi memosisikan rakyat sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah perubahan. Pemimpin sejati bukanlah yang membuat rakyat bergantung padanya, tetapi yang

membangun kemandirian rakyatnya. Model kepemimpinan partisipatif berakar pada semangat musyawarah dan syura dalam Islam, di mana keputusan dihasilkan melalui dialog, keterlibatan, dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini sekaligus menjadi antitesis terhadap kepemimpinan transaksional yang membangun hubungan patronklien melalui imbalan, janji jabatan, atau politik uang. Kepemimpinan partisipatif juga memperluas makna power bukan sekadar kekuasaan untuk mengatur, tetapi kemampuan untuk menggerakkan potensi kolektif masyarakat. Memberdayakan bawahan, komunitas, dan institusi, pemimpin mencipta-kan ekosistem perubahan yang berkelanjutan, bukan ketergantung-an yang rapuh.

c. Kepemimpinan Berbasis Visi dan Perubahan Sosial

Pilar ketiga dari reorientasi kepemimpinan adalah peneguhan visi jangka panjang dan komitmen terhadap perubahan sosial. Kepemimpinan yang kehilangan visi ibarat kapal tanpa arah bergerak, tetapi tak tahu ke mana hendak menuju. Visi memberikan makna pada tindakan, arah pada kebijakan, dan semangat pada pengikut.

Kepemimpinan transformasional memandang kekuasaan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*public good*). Visi semacam ini menuntut kemampuan intelektual dan moral yang tinggi: intelektual untuk membaca arah zaman, moral untuk memastikan perubahan berjalan dalam koridor nilai.

Visi kepemimpinan dalam konteks bangsa Indonesia, harus diarahkan pada pembangunan manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan berkeadilan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tidak berjiwa. Hanya dengan visi yang jelas dan berakar pada nilai spiritual, bangsa ini dapat keluar dari lingkaran politik pragmatis yang mengikis idealisme nasional.

3. Integrasi Spiritualitas dalam Kepemimpinan

Krisis kepemimpinan modern sesungguhnya berakar pada hilangnya dimensi spiritualitas dalam kekuasaan. Kepemimpinan dipahami sebatas administrasi, manajemen, atau strategi politik, tanpa kesadaran bahwa setiap kekuasaan adalah ujian, amanah dan tanggung jawab dihadapan Tuhan. Padahal, dalam khazanah Islam, konsep kepemimpinan selalu dikaitkan dengan dua kata kunci: amanah dan hisab. Amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan ke-kuasaan, sementara hisab menanamkan kesadaran akan pertanggung-jawaban di akhirat.

Integrasi spiritualitas bukan berarti membawa agama ke dalam politik secara simbolik, tetapi menghidupkan kembali dimensi moral dalam praktik kekuasaan. Pemimpin yang beriman dan berakhlak akan mengutamakan maslahat rakyat, menjauhi korupsi, dan menolak manipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi. Seperti ungkapan hikmah relevan: ***Pemimpin yang takut kepada Allah akan dicintai rakyatnya; pemimpin yang hanya takut kehilangan jabatan akan memperdagangkan rakyatnya.***

Ungkapan ini menegaskan bahwa spiritualitas bukan sekadar aspek privat, melainkan fondasi publik bagi lahirnya kepemimpinan berkarakter dan

berkeadilan. Mengembalikan ruh *amanah, adl* (keadilan), *shiddiq* (kejujuran), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (kecerdasan), Indonesia dapat kembali menemukan model kepemimpinan profetik yakni kepemimpinan yang tidak hanya memerintah dengan otoritas, tetapi mengarahkan dengan nurani.

Reorientasi kepemimpinan bukan sekadar reformasi struktural, melainkan transformasi spiritual dan moral. Ia menuntut keberanian untuk melawan arus pragmatisme, mengembalikan politik kepada nilai, dan menegakkan keteladanan sebagai kekuatan utama perubahan. Hanya dengan pemimpin yang berani jujur, adil, dan berjiwa amanah, bangsa ini dapat keluar dari krisis keteladanan menuju era kepemimpinan yang kembali menyalakan ruh transformasional sebuah kepemimpinan yang memanusiakan manusia dan memuliakan bangsa.

Implikasi Akademik dan Sosial

1. Implikasi Akademik

Krisis keteladanan dan meningkatnya politik pragmatis di Indonesia bukan hanya persoalan etika politik, melainkan juga tantangan akademik bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kepemimpinan (leadership studies). Fenomena ini menuntut adanya pendekatan baru yang multidisipliner, melampaui batasan psikologi organisasi atau teori manajemen konvensional, menuju pada pendekatan yang mengintegrasikan dimensi moral, politik, spiritual, dan sosial secara utuh.

a. Pengembangan Riset Kepemimpinan Multidisipliner:

Dibutuhkan pengembangan riset kepemimpinan yang menggabungkan berbagai

disiplin ilmu: (1) Psikologi kepemimpinan untuk memahami dinamika kepribadian, motivasi, dan emosi moral pemimpin; (2) Ilmu politik untuk menelaah sistem kekuasaan, proses rekrutmen, dan budaya politik yang membentuk perilaku pemimpin; (3) Etika dan filsafat moral untuk menilai arah dan legitimasi kepemimpinan dalam bingkai nilai kemanusiaan dan ketuhanan; dan (4) Studi agama dan spiritualitas untuk mengembalikan orientasi kepemimpinan pada nilai[2] profetik dan kesadaran transendental.

Pendekatan semacam ini memungkinkan munculnya peta konseptual baru yang lebih sesuai dengan realitas Indonesia sebuah negara yang kompleks secara sosiokultural, religius, namun sedang menghadapi erosi integritas publik.

b. Model "*Transformative–Transcendental Leadership*"

Dari refleksi tersebut, muncul kebutuhan untuk merumuskan model kepemimpinan baru yang tidak berhenti pada transformasi struktural, tetapi menembus dimensi spiritual dan moral. Model ini dapat disebut sebagai *transformative transcendental leadership* yakni kepemimpinan yang menggabungkan kekuatan transformasional (visi, inspirasi, pemberdayaan) dengan kesadaran transendental (spiritualitas, amanah, dan tanggung jawab ilahiyah).

Model ini memiliki empat dimensi utama, yaitu: (1) Dimensi moral kepemimpinan yang berakar pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab etis; (2) Dimensi spiritual kesadaran akan hisab dan amanah sebagai dasar motivasi kekuasaan; (3) Dimensi sosial transformasional kemampuan menggerakkan perubahan sosial dan

membangkitkan kesadaran kolektif; dan (4) Dimensi intelektual kritis keberanian berpikir independen dan menentang status quo yang tidak adil.

Dengan demikian, ilmu kepemimpinan di Indonesia perlu berkembang dari sekadar adaptasi teori Barat menuju konstruksi epistemologis baru yang bersumber dari nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan pengalaman sejarah bangsa. Ini bukan penolakan terhadap teori modern, melainkan upaya dekolonisasi ilmu kepemimpinan agar lebih kontekstual, inklusif, dan bermakna bagi pembangunan karakter bangsa.

2. Implikasi Sosial dan Kebijakan

a. Pendidikan Kepemimpinan Berbasis Karakter

Implikasi sosial paling urgen dari reorientasi kepemimpinan adalah perlunya pendidikan kepemimpinan berbasis karakter dan nilai di berbagai level: mulai dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan kader, hingga birokrasi dan organisasi publik. Kepemimpinan tidak boleh lagi di-ajarkan semata-mata sebagai teknik manajerial atau kemampuan retoris, tetapi sebagai proses pembentukan moralitas publik dan spiritualitas sosial. Perguruan tinggi terutama yang memiliki visi keislaman dan kebangsaan harus menjadi laboratorium pembentukan pemimpin berjiwa amanah, adil, dan visioner, bukan sekadar penghasil administrator teknis.

Pelatihan dan kurikulum kepemimpinan yang menekankan: (1) Etika publik dan tanggung jawab sosial; (2) Kecerdasan emosional dan moral (moral intelligence); (3) Pengabdian masyarakat sebagai wahana nyata kepemimpinan transformatif; dan (4) Integrasi nilai keagamaan dalam praktik

kepemimpinan modern. Langkah ini, di-harapkan lahir generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

b. Reorientasi Rekrutmen Politik

Implikasi kedua yang tidak kalah penting adalah reorientasi sistem rekrutmen politik dan birokrasi. Selama ini, proses politik di Indonesia terlalu didominasi oleh transaksionalitas uang, koneksi, dan kepentingan pragmatis menjadi tiket utama menuju kekuasaan. Akibatnya, banyak jabatan publik diisi oleh figur yang minim integritas dan visi.

Perlu langkah serius untuk mengembalikan rekrutmen politik pada prinsip meritokrasi dan moralitas, antara lain dengan: (1) Memperkuat regulasi dan transparansi dalam pencalonan pejabat publik; (2) Membangun lembaga penilai integritas calon pemimpin (integrity assessment bodies); (3) Mengembangkan sistem leadership pipeline berbasis karakter di partai politik, birokrasi, dan lembaga pendidikan; (4) Menegakkan sanksi sosial dan politik bagi praktik politik uang serta patronase; dan (5) Reformasi rekrutmen ini merupakan langkah fundamental untuk mem-perbaiki kualitas demokrasi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.

3. Kontribusi Keilmuan Pribadi

Sebagai bagian dari refleksi ilmiah dan tanggung jawab akademik, gagasan ini sekaligus menegaskan kontribusi keilmuan pribadi Bapak dalam bidang pengembangan model kepemimpinan bernilai, yakni *trans-formational prophetic leadership*. Model ini

berangkat dari pemikiran bahwa krisis kepemimpinan tidak dapat diatasi hanya dengan teori manajemen modern, melainkan memerlukan pendekatan profetik yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan nilai kemanusiaan.

Kepemimpinan profetik yang meneladani sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi paradigma akademik baru dalam studi kepemimpinan kontemporer. Pendekatan ini memiliki beberapa kontribusi ilmiah utama: a) Menawarkan sintesis antara teori Barat dan nilai-nilai Islam, menciptakan dialog epistemologis yang produktif; b) Menghadirkan model kepemimpinan integral yang menyatukan aspek moral, spiritual, dan manajerial; dan c) Memberikan dasar konseptual untuk reformasi pendidikan dan kebijakan publik di Indonesia.

Karena itu, karya ilmiah dan refleksi orasi ini tidak berhenti sebagai kritik sosial, tetapi menjadi kontribusi akademik yang visioner menghadirkan ilmu kepemimpinan yang bukan hanya mengatur, tetapi juga mencerahkan; bukan hanya mengelola kekuasaan, tetapi meng-hidupkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam ruang publik.

Penutup dan Seruan Moral

Hadirin yang saya muliakan,

Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, sejatinya kita sedang berbicara tentang amanah terbesar yang dititipkan Allah kepada manusia. Amanah yang beratnya membuat langit, bumi, dan gunung-gunung enggan memikulnya, firman Allah dalam **(QS al-Aḥzāb/33:72)**

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ

"*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh*".

Ayat ini bukan hanya menggambarkan beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, tetapi juga menyingkap betapa mudahnya manusia tergelincir dalam kesombongan kekuasaan. Sebab itu, kepemimpinan yang sejati tidak diukur dari tinggi kursi yang diduduki, tetapi dari kedalaman nurani dan keikhlasan dalam melayani.

1. Refleksi Moral: Dari Transformasi ke Transaksi

Kita sedang hidup di masa di mana kepemimpinan yang dahulu dimaknai sebagai pengabdian kini sering berubah menjadi perdagangan kepentingan. Dari kepemimpinan transformasional yang menyalakan api perubahan, kita tergelincir menuju kepemimpinan transaksional yang hanya menyalakan kalkulator keuntungan. Dari visi kebangsaan, kita terperosok dalam politik balas budi. Dari amanah, kita terjebak dalam ambisi.

Inilah krisis keteladanan yang saya maksud sebuah krisis yang tidak hanya menggerogoti lembaga, tetapi mengikis ruh moral bangsa. Namun, sebagaimana sejarah telah berulang kali menunjukkan, setiap krisis besar selalu menjadi pintu bagi kebangkitan baru. Maka orasi ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga seruan untuk reorientasi: bahwa kepemimpinan sejati harus kembali pada fitrahnya sebagai amanah, ibadah, dan peradaban.

2. Seruan Reorientasi Kepemimpinan

Hari ini, bangsa Indonesia tidak kekurangan orang pandai, tetapi kekurangan pemimpin yang bijak dan berani berkorban. Kita tidak kekurangan strategi, tetapi kekurangan jiwa yang jujur dan berintegritas. Kita tidak kekurangan program, tetapi kekurangan keteladanan moral yang menggerakkan hati rakyat.

Maka, tugas kita bersama akademisi, politisi, birokrat, ulama, dan generasi muda adalah mengembalikan kepemimpinan pada akar moralnya. Kepemimpinan bukan hanya mengelola kekuasaan, tetapi juga menuntun jiwa masyarakat menuju kebaikan. Kepemimpinan yang bukan hanya berbicara tentang target dan capaian, tetapi tentang makna, nilai, dan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, ***"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka."*** (HR Muslim)

Inilah cita-cita kepemimpinan profetik kepemimpinan yang memimpin dengan cinta, melayani dengan keikhlasan, dan menegakkan kebenaran dengan keberanian.

3. Doa dan Harapan

Izinkan saya menutup orasi ini dengan sebuah doa dan refleksi: Semoga dari ruang-ruang akademik ini, dari mimbar keilmuan yang kita junjung tinggi, lahir generasi pemimpin yang berilmu dan berjiwa amanah, yang tidak hanya memimpin dengan kecerdasan, tetapi juga dengan ketulusan dan takut kepada Allah.

Semoga setiap amanah jabatan menjadi wasilah kebaikan, bukan jalan menuju kezaliman. Semoga setiap pemimpin yang lahir dari rahim bangsa ini menyadari bahwa kekuasaan bukan mahkota

kebesaran, melainkan ujian pertanggungjawaban. Dan semoga kita semua dengan peran dan kapasitas masing-masing dapat menjadi bagian dari kebangkitan moral kepemimpinan bangsa Indonesia. Karena, sebagaimana dikatakan Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, *"Sesungguhnya kekuasaan bukanlah nikmat yang diwariskan, tetapi ujian yang akan dipertanyakan."*

Hadirin yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato pengukuhan ini, izinkan saya menundukkan hati dan mengangkat rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang tidak hanya tercurah kepada diri saya, tetapi juga kepada segenap keluarga yang senantiasa membersamai perjalanan akademik dan kehidupan saya. Atas izin dan kehendak-Nya pula, saya dianugerahi amanah jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Kepemimpinan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga saya senantiasa dimampukan untuk memantaskan diri, menjaga amanah ini, serta mengembannya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan integritas.

Kesempatan yang mulia ini, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, menguatkan, dan membantu mengantarkan saya hingga pada titik ini. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keteguhan, dan kasih sayang-Nya kepada Bapak dan Ibu sekalian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas

penerimaan usulan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Kepemimpinan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.

2. Ketua Senat UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., dan Ketua Dewan Guru Besar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., beserta sekretaris serta seluruh anggota Senat dan Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar, atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri dan menyampaikan pidato dalam forum akademik yang terhormat ini.
3. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D., beserta para Wakil Rektor, atas dukungan moril dan materil yang diberikan dalam proses pencapaian jabatan akademik ini.
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Drs. H. Sulaiman, M.Pd., serta Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Dr. H. Kaswad Sartono, atas bantuan dan pendampingan administrasi yang sangat berarti.
5. Dekan dan Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prof. Dr. Amiruddin K., M.Ag., Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag., Dr. Mustiadi Awaluddin, SE., M.Si., dan Dr. Hasbiullah, SE., M.Si. beserta seluruh unsur pimpinan fakultas dan sivitas akademika FEBI UIN Alauddin Makassar, atas motivasi, dukungan, dan kemudahan yang diberikan sepanjang proses pengajuan Guru Besar, dan terkhusus kepada Dr. Alim Syariati, SE,M.Si.
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen, serta seluruh kolega dosen Program Studi Manajemen, yang

telah menjadi rekan kerja sekaligus sahabat dalam menjalankan amanah tridharma perguruan tinggi.

7. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh anggota, atas dukungan dan pendampingan yang konsisten dalam pemenuhan seluruh persyaratan akademik.
8. Para maha guru dan pembimbing Disertasi saya: Prof. Dr. H. A. Karim Saleh (Alm), Prof. DR. H. M.Yunus Zain, MA. (Alm), Prof. Dr. H. Abd. Rahman Laba, M.B.A.; serta tim Penguji: Prof. Dr. Djabir Hamzah, M.A.; Prof. Dr. H. La Tanro, MA.; Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A.; dan Prof. Dr. Hj. St. Haerani, SE., M.Si.; serta guru-guru besar dalam lingkup UIN Alauddin yang banyak mengarahkan: Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing, H.T., M.S.; Prof. Dr. H. Musafir Pababari, MS.; Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.; Prof. Dr. Muslimin Kara, M.Ag.; Prof. Dr. H. Hamzah Haeriah, M.Ag., atas ilmu, keteladanan, motivasi, dan kebersamaan sebagai mentor dan guru kehidupan akademik saya.
9. Keluarga tercinta dan handai taulan, yang menjadi sumber doa dan kekuatan:
    - Ayahanda dan Ibunda tercinta, almarhum H. Makkio Kuba dan Almarhumah Hajjah Patimasang Piddi. Semoga Allah swt, menerima segala amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan dan menerangi kuburnya, serta menganugerahi surga-Nya. Amin ya Rabbal 'alamin.
    - Ayah dan ibu mertua saya, almarhum H. A. M. Djanieb Opu Tedong dan Almarhumah Hajjah Hadiah Manra. Semoga Allah swt. menerima amal ibadah keduanya dan memberikan balasan surga.
    - Pendamping jiwa saya, ..., teman hidup sekaligus mitra diskusi dan berbagi kebahagiaan. Terima kasih

atas kesabaran dan ketulusan dalam membersamai perjalanan panjang ini.

- Putra-putri dan menantu tercinta, (Dr. Cand.) Inayyah Nur Fitri Siradjuddin, SKM.,M.Kes. dan Suami dr. Joko Suhada Pinem, S.Ked.), (Dr. Cand.) Imanuar Nur Fajriany Siradjuddin, SM., ME., dan (Suami Juanda Zulqadri, SM., ME.), Muhammad Fachrul Nur Ramadhan Siradjuddin, SH., Ilmiah Nur Faizah Siradjuddin, SE., dan Muhammad Fajar Nur Rizki Siradjuddin (Semester IV di UIN Suka). Teruslah menyalakan semangat belajar dan meraih mimpi. Doa dan dukungan kami akan selalu menyertai langkah kalian.
- Kakak-kakak dan adik-adikku: Drs. H. Manai Sofyan, SH., MH., H. Mansyur Sira; H. Agus, S.Pd., MH., dan Hj. Rahma, S.Com., yang dengan ketulusan keikhlasannya terus mendoakan, sehingga saa bisa sampai pada titik ini
- Seluruh keluarga besar, saudara-saudari, ipar, keponakan, dan handai taulan yang menjadi *supporting system* dalam suka dan duka perjalanan hidup kami yang tidak sempat kami sebut satu persatu karena keterbatasn waktu yang diberikan.

10. Para sahabat dosen dalam lingkup UIN, kolega, dan rekan seperjuangan, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, yang telah memberikan persahabatan, kebersamaan, dan warna dalam perjalanan akademik dan pengabdian sosial saya.
11. Tim kepegawaian Rektorat UIN Alauddin Makassar serta tim umum dan kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Bapak Rudianto, Ibu Adenila dan Bapak Wawan, atas perhatian dan dedikasi dalam memastikan seluruh proses pengusulan Guru Besar saya lengkap, dan berjalan sesuai ketentuan.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya tidak akan mampu membalas seluruh jasa, kebaikan, dan pengorbanan tersebut. Karena itu, saya hanya dapat memohon kepada Allah Swt. agar membalas semuanya dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan mendoakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian pidato ini.

Wallāhu al-Muwaffiq ilā Aqwami al-Ṭarīq. Wassalāmu ‘alaikum waraḥmatul-lāhi wabarakātuh.

DAFTAR PUSTAKA

al-Shalaby, Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Khattab*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.

Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press, 2016.

Bass, Bernard M, and Ronald E Riggio. *Transformational Leadership*. Psychology press, 2006.

Burns, James MacGregor. *Leadership*. Open Road Media, 2012.

Dantley, Michael E. "Moral Leadership." *The Sage Handbook of Educational Leadership*, 2005, 34–46.

Eva, Nathan, Mulyadi Robin, Sen Sendjaya, Dirk Van Dierendonck, and Robert C Liden. "Servant Leadership: A Systematic Review and Call for Future Research." *The Leadership Quarterly* 30, no. 1 (2019): 111–32.

Fahrezi, Muhammad Alif, Warjio Warjio, and Indra Fauzan. "Model Rekrutmen Politik Caleg Partai Hanura Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *PERSPEKTIF* 13, no. 4 (2024): 1015–24.

Handoko, Hani, and Fandy Tjiptono. "Kepemimpinan Transformasional Dan Pemberdayaan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 11, no. 1 (1996).

Hendrikz, Karen, and Amos S Engelbrecht. "The Principled Leadership Scale: An Integration of Value-Based Leadership." *SA Journal of Industrial Psychology* 45, no. 1 (2019): 1–10.

Hermawan, Rido, R R Dewi Anggraeni, Muhammad Yunus Amar, Abdul Rahman Kadir, and Nurjannah Hamid. "The Influence of Visionary Leadership on the Success of Organizational Transformation." *An-*

Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora 2, no. 2 (2024): 100–108.

Heyes, Cressida J. "Dislocation and Self-Certainty: Remarks on Disorientation and Moral Life." *Feminist Philosophy Quarterly* 4, no. 2 (2018).

Lai, Andrea. "Transformational-Transactional Leadership Theory." *AHS Capstone Projects Paper* 17 (2011): 1–33.

Leithwood, Kenneth, and Doris Jantzi. "Transformational Leadership." *The Essentials of School Leadership* 31 (2005): 43.

Novitasari, Risma, and Ardan Alif. "Mewujudkan Keadilan Politik Di Era Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketimpangan Dan Akses Kekuasaan." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 2 (2025): 350–55.

Rosyidi, Muh Hasyim. "Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 19–31.

Sejati, Satryo Pringgo, and Ahmad Burhan Hakim. "Politik Transaksional Dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 69–75.

Strachan, J Cherie, and Michael R Wolf. "Political Civility: Introduction to Political Civility." *PS: Political Science & Politics* 45, no. 3 (2012): 401–4.

Susmoro, Harjo. *Kepemimpinan Robbani*. Pandiva Buku, 2022.

Tavanti, Marco. "Transactional Leadership." In *Leadership: The Key Concepts*, 2008.

Thoyibah, Firda Amalia. "Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern." *IHSAN: Jurnal*

Pendidikan Islam 3, no. 3 (2025): 582–89.

Wibawa, Dwi Ari. "Kepemimpinan Transaksional Dan Kepemimpinan Transformasional." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2012.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: **Prof. Dr. Siradjuddin, SE.,M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 09 Mei 1966
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Pangkat/Golongan	: IV.c/Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional	: Guru Besar dalam Rating Ilmu MSDM - Kepemimpinan
Alamat e-mail	: siradjuddin@uin-alauddin.ac.id
NIDN	: 2009056601
NIP/NIK	: 196605092005011003
Alamat Rumah	: Jln. Toddopuli V/Stp. 11/ No. 104 Makassar
	: (0411) 4663159; Hp. +62811462477

B. Keluarga:

Isteri	: Musdiany Djanieb, SE.
Orang Tua:	
• Ayah	: H. Makkio Kuba (Alm)
• Ibu	: Hj. Patimasang Piddi (Alm)
Mertua	: H. A. M. Djanieb Opu Tedong (Alm)
	: Hj. Hadia Manra (Alm)

Anak : 1. Dr(Cand) Inayyah N Fitri Siradjuddin, S.Km., M.Kes
2. Dr(Cand) Imaniar N Fajriany Siradjuddin, SM., ME.
3. Muhammad Fachrul N Ramadhan Siradjuddin, SH.
4. Ilmiah N Faizah Siradjuddin, SE.
5. Muhammad Fajar N Rizki Siradjuddin (SM IV UINSK)
6. Insyirah N Fadhila Siradjuddin (Alm)

Menantu : 1. dr. Joko Suhada Pinem, S.Ked.
2. Juanda Zulqadri, SM., ME.

Cucu : 1. Muhammad Apgar Al Fazah Pinem
2. Eisha Rasyadah Al Ameera Ramadhani

Saudara : 1. Drs. H. Manai Sofyan, SH., MH.
2. H. Mansur Sira
3. H. Agus, S.Pd, MH.
4. Hj. Rahma, S. Com.

C. Pendidikan:

- 1980 : Sekolah Dasar Negeri Tamalanrea
- 1983 : SMP Swasta Muhammadiyah I
- 1986 : SMA Negeri 6 Ujung Pandang
- 1994 : Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
- 2000 : Univeritas Hasanuddin (UNHAS)
- 2008 : Univeritas Hasanuddin (UNHAS)

D. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi dan Non Reputasi serta Prociding:

- 2025 : The Dynamics Between Technological Support, Work-Life Balance, and Islamic Leaders' Productivity in Indonesia (Q3)

- 2025 : Employee Engagement in Mediating Transformational Leadership and Perceived Organizational Support on Employee Performance of Religious Training Centers in Indonesia (Q4)
- 2025 : The Halal Industry in Southeast Asia: A Comparison of the Development of Indonesia and Thailand
- 2025 : E-Service Quality, Islamic Branding, and Islamic Advertising Ethics on Product Purchase Decisions with Celebrity Endorsers as Intervening Variables (Case of UIN Postgraduate)
- 2025 : Branding and Marketing Opportunities for SME Halal Industry Products: An Insight Consumer Perception in South Sulawesi
- 2025 : The Role of Islamic Banking and Transpormation Leadership in The Development of Halal Industri: An Overview of Financing and Policy
- 2024 : A Literature Review on the Effect of Perceived Organizational Support on Employee Engagement and Employee Performance of Government Agencies in Singapore, Thailand and Indonesia
- 2024 : Islamic Golden Age: Analisis Kebijakan Daulah Abbasiyah dalam Bidang Ekonomi dan Relevansi pada Masa Kini
- 2024 : Digital Transformation and Human Resource Development Strategies to Enhance the Global Competitiveness of the Halal Industry

- 2024 : Governance and Development of Halal Industrial Infra-structure: Supporting the Pillars of Economic Sustainability
- 2024 : Mediating Effects of Islamic Business Success on Productive Zakat and Mustahiq Welfare (Q3)
- 2024 : Potential of Halal Industry in South Sulawesi Province: An Analysis of Opportunities, Challenges, And Strategies
- 2023 : The Conceptual Framework of *Mustahiq* Entrepreneurs' Welfare in Productive Zakat Empowerment (Sharia Maqasid Approach) (Q4)
- 2023 : Use of the Flip Application in Fintech Transactions from an Islamic Economic Perspective: Wahdah Islamiyah Cadre Flip User Study
- 2023 : Utilization of Digital Technology-Based Marketing for the development of micro, small and medium enterprises
- 2023 : Initial and dynamics of conventional and Islamic economic thoughts
- 2023 : The Foundation of Islamic Law and Positive Law for the Development of the Halal Product Industry in Indonesia
- 2022 : Application of The Basic Concept of Islamic Economics to The Effectiveness of Sharia Property Companies (Prociding)
- 2022 : Consumption Theory And Benefit of Consumption (Maslahah) In Islamic Consumer Behavior (Prociding)
- 2021 : Islamic Marketing Management for SMES
- 2021 : The Determinant of Student Decision to Continue Their Study on Postgraduate

Sharia Economic Study Program of Uin Alauddin Makassar

E. Buku:

- 2025 : Kepemimpinan, Makassar, Rajawali Press
- 2013 : Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syariah: Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Makassar, Alauddin University Press.
- 2012 : Pengantar Teori Ekonomi Makro, Makassar, Alauddin University Press.
- 2011 : Perilaku Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Selatan. Makassar, Alauddin University Press.

F. Jabatan dalam Pengelolaan Institusi:

- Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2019 – 2023)
- Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Muawanah UIN Alauddin Makassar (2015 – 2019).
- Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2015 – 2019).
- Manajer Simpan-Pinjam Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al Muawanah UIN Alauddin Makassar (2010 – 2015)
- Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2009 – 2013)
- Asisten Direktur Bidang Pengembangan Usaha Pusat Kegiatan Usaha UIN Alauddin Makassar (2009 – 2011)

G. Organisasi Profesi dan Tanda Kehormatan:

- Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah, Sulawesi Selatang (2015 – 2019).
- Pengurus Assosiasi Forum Program Studi Ilmu Ekonomi Indonesia (2015 – 2019)
- Forum Kajian Ilmu Syariah dan Hukum (FOKASIH) UIN Alauddin Makassar(2008 –sekarang)
- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan (2007 – Sekarang).
- Ikatan Sarjana Ekonomi Islam Indonesia (ISEII) Sulawesi Selatan (2005 – Sekarang).
- Satya Lencana Karya Satya XX Tahun, 2025
- Satya Lencana Karya Satya X Tahun, 2015

CV. BERKAH UTAMI
0812941116
Jl. St. Alauddin No. 127
berkahutami121@gmail.com